

RENCANA STRATEGIS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(REVISI RENSTRA – SKPD)

2016 - 2021



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2017**

JALAN NUSA INDAH No. 05

Telpon (0567) 21047

PUTUSSIBAU



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat menunaikan perintahNya serta diberikan kesempatan sebagai abdi Negara untuk melayani masyarakat.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia serta perkenanNya jualah, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dokumen Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu selama satu sampai dengan lima tahun mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis yang realitas. Dengan visi, misi strategis yang jelas dan tepat, maka diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan penyusunan Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Pemerintah. Dimana sangat diperlukan intensitas antar keahlian Sumber Daya Manusia dengan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah.

Melalui Renstra ini, kami akan menyusun Rencana Kinerja (RENJA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dalam mengemban tugas di Era Otonomi Daerah.

Kami menyadari bahwa, dalam penulisan Renstra ini masih banyak sekali kekurangan disana - sini, oleh karena itu guna penyempurnaan yang lebih baik dalam pembuatan dokumen tersebut saran dan pendapat dari para pembaca yang budiman Sangat kami harapkan.

Dokumen Perencanaan Stratejik (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 yang telah disusun ini semoga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik Pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Putussibau, Maret 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN KAPUAS HULU



Drs. H. ABDUL HALIM

Pembina TK.I

NIP. 19600410 198910 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. 1 LATAR BELAKANG.....	2
1. 2 LANDASAN HUKUM.....	3
1. 3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1. 4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II	7
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	7
2. 1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN.....	7
2. 2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN.....	8
2. 3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	11
2. 4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN.....	12
BAB III	13
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	13
3. 1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN.....	13
3. 2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	14
3. 3 TELAAHAN RENSTRA K / L DAN RENSTRA.....	16

3. 4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	17
3. 5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS.....	26
BAB IV	28
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN	28
4. 1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN.....	28
4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN	28
BAB V	
STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN.....	30
5.1 STRATEGI	30
5.2 KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN	39
BAB VI.....	46
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	46
BAB VIII.....	47
PENUTUP	

LAMPIRAN

1. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021
2. Indikator Kinerja Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021
3. Matriks Pagu Indikatif Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021
4. Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021.

LAMPIRAN I

*Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun
2016 – 2021*

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
Tahun 2016 - 2021

VISI : Menuju Kapuas Hulu yang lebih sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis

MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih

Tujuan		Sasaran				Cara mencapai Tujuan dan Sasaran				S e k/			
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan	Program							
1.1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perhubungan yang lebih baik	1	Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu	1.1.1	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	1	Evaluasi Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu	1.1.1.1	Melaksanakan Reviu Kinerja Organisasi Secara Berkala	1.1.1.1	Peningkatan Kualitas tata laksana dan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
												2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
												3	Program Peningkatan Displin Aparatur
												4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
												5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

VISI : Menuju Kapuas Hulu yang lebih sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis

MISI 2 : Meningkatkan Layanan Infrastruktur dasar dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

<i>Tujuan</i>		<i>Sasaran</i>				<i>Cara mencapai Tujuan dan Sasaran</i>				<i>Sek/B</i>			
<i>Uraian</i>		<i>Indikator Kinerja</i>		<i>Uraian</i>		<i>Indikator Kinerja</i>		<i>Strategi</i>		<i>Kebijakan</i>		<i>Program</i>	
2.1	Meningkatkan kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang mampu	1	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan	2.1.1	Meningkatnya kelancaran dan Pelayanan transportasi	1	Prosentase Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	2.1.1.1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendukung Infrastruktur Transportasi	2.1.1.1	meningkatkanKualitas dan Kuantitas Saranana dan Prasarana pendukung Infrastruktur Transportasi	1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
						2	Prosentase peLayanan angkutan Darat dan Sungai					2	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
												3	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
												4	Program Peningkatan dan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
												5	Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan

LAMPIRAN II

**Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Perhubungan
Tahun 2016 - 2021**

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Perhubungan
TAHUN 2016 - 2021

V I S I : Menuju Kapuas Hulu yang lebih sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis

M I S I 1 : Memperkuat Tata Kelola Kepemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih

TUJUAN 1.1 : Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Dinas Perhubungan yang lebih baik

No	Indikator Tujuan	Satuan	Target Indikator Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu	Nilai	C	CC	CC	B	B	BB

Sasaran			Satuan	Target Indikator Kinerja						<i>Sek/Bidang/Bagian Pelaksana</i>	
Uraian	Indikator Kinerja			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	1	Evaluasi Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu	Nilai	C	CC	CC	B	B	BB	Sekretariat

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Perhubungan
TAHUN 2016 - 2021

V I S I : Menuju Kapuas Hulu yang lebih sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis

M I S I 2 : Meningkatkan Layanan Infrastruktur dasar dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

TUJUAN 2.1 : Meningkatkan kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan

No	Indikator Tujuan	Satuan	Target Indikator Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	25,00%	35,00%	45,00%	50,00%	60,00%	70,00%

Sasaran			Satuan	Target Indikator Kinerja						Sek/Bidang/Bagian Pelaksana	
Uraian	Indikator Kinerja			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Meningkatnya kelancaran dan Pelayanan Perhubungan	1	PorsentaseJumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang dibangun	%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	Bidang LLAJ dan LLASDP
		2	Porsentase Pelayanan Layanan Angkutan Darat dan Sungai	%	45.00%	55.00%	65.00%	75.00%	85.00%	95.00%	

LAMPIRAN III

**Matriks Pagu Indikatif Rencana Strategis Dinas
Perhubungan Tahun 2016 – 2021**

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Matriks Pagu Indikatif Rencana Strategis Dinas Perhubungan
Tahun 2016 - 2021

VISI : Terwujudnya penyelenggaraan Perhubungan yang tertib, aman, lancar dan berkembang guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih

TUJUAN 1.1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perhubungan yang lebih baik

Sasaran			Program dan Kegiatan						Sek/Bidang/Bagian Pelaksana		
Uraian	Indikator Kinerja			2017	2018	2019	2020	2021			
1	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran	1	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1	program pelayanan administrasi perkantoran	1,098,569,600	1,539,519,260	1,684,564,778	1,671,534,870	1,837,191,963	Sekretariat
				2	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	173,000,000	1,210,500,000	265,281,059	263,229,141	257,820,906	Sekretariat
2	meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	2	prosentase peningkatan kualitas sumber daya aparatur	3	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	57,500,000	170,000,000	88,171,450	87,489,455	85,691,920	Sekretariat
		3	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4,553,000	99,000,000	6,981,645	6,927,643	6,785,310	Sekretariat
				5	program peningkatan disiplin aparatur			60,416,611	59,949,296	58,717,594	Sekretariat

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Matriks Pagu Indikatif Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Tahun 2016 - 2021

- VISI** : Menuju Kapuas Hulu yang lebih sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis
- MISI 2** : Meningkatkan Layanan Infrastruktur dasar dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan
- TUJUAN 2.1** : Meningkatkan kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan

Sasaran		Program dan Kegiatan		PAGU INDIKATIF (Rp)					Sek/Bidang/Bagian Pelaksana		
Uraian	Indikator Kinerja			2017	2018	2019	2020	2021			
1	peningkatan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas	1	pelayanan jasa angkutan	1	program peningkatan pelayanan angkutan	329,792,000	554,071,200	505,708,502	501,796,908	491,487,123	Bidang LLAJ & ASDP
2	peningkatan kelancaran transportasi	2	kelancaran dan keamanan pengguna jasa transportasi	2	program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	5,707,075,400	3,915,000,000	8,751,323,723	8,683,633,280	8,505,221,676	Bidang LLAJ & ASDP
3	peningkatan keselamatan pengguna jalan	3	angka kecelakaan pengguna jalan rendah	3	program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	182,000,000	850,000,000	279,081,807	276,923,143	271,233,554	Bidang LLAJ & ASDP
4	masyarakat pengguna kendaraan bermotor	4	kendaraan bermotor yang layak jalan	4	program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	28,760,000	40,000,000	441,001,059	43,759,943	42,860,863	Bidang LLAJ & ASDP
5	peningkatan kelancaran transportasi	5	kelancaran dan keamanan pengguna jasa transportasi	5	program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		490,000,000	383,354,131	380,388,933	372,573,564	Bidang LLAJ & ASDP

LAMPIRAN IV

**Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif Rencana Strategis Dinas Perhubungan**

Tahun 2016 -2021

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Kinerja Program	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Unit Kinerja SKPD Penanggung	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	0	0%	1,494,864,600	0%	1,415,122,500	0%	1,800,650,240	0%	1,747,610,240	0%	1,739,490,240	0%	8,197,737,820	DISHUB	KAB. KAPUAS HULU
		1.02.09.01.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase Surat Menyurat		12 bln	11,500,000	12 bln	12,650,000	60 bln	62,100,000								
		02	Kegiatan	jumlah bulan		12 bln	30,000,000	12 bln	67,200,000	60 bln	298,800,000								
		06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasi		4 unit	9,500,000	5 unit	12,000,000	24 unit	57,500,000								
		07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Administrasi Keuangan		12 bln	70,080,000	15 org	86,100,000	20 org	102,600,000	20 org	102,600,000	20 org	102,600,000	60 bln	463,980,000		
		08	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan	jumlah satpam dan cleaning service		12 bln	12,765,200	4 org	88,157,000	16 org	365,393,200								
		09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	jumlah Peralatan kerja dalam kondisi baik		12 bln	33,500,000	38 unit	25,000,000	50 unit	32,894,740	50 unit	32,894,740	50 unit	32,894,740	188 unit	157,184,220		
		10	Kegiatan Penyediaan Alat	Alat Tulis Kantor		12 bln	43,672,000	12 bln	38,710,000	60 bln	198,512,000								
		11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Barang Cetak dan Pengandaan		12 bln	30,000,000	12 bln	32,852,000	60 bln	161,408,000								
		12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 bln	15,000,000	12 bln	7,129,000	60 bln	43,516,000								
		13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3 unit	20,930,000	0	-	6 set	48,000,000	5 unit	50,000,000	3 set	30,000,000	17 unit	148,930,000		
			Kegiatan pengadaan Peralatan meubeler Kantor	jumlah Peralatan meubeler Kantor						10 set	50,000,000	10 set	30,000,000	10 set	30,000,000	30 set	110,000,000		
		14	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah tangga	jumlah Peralatan dapur dan rumah tangga		-	0.00	0	0.00	6 unit	50,000,000	1 unit	11,000,000	1 unit	11,000,000	8 unit	72,000,000		
		15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4 penerbit	14,080,000	5 penerbit	16,560,000	3 penerbit	26,496,000	3 penerbit	26,496,000	3 penerbit	26,496,000	60 bln	110,128,000		

MENINGKATKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN DINAS PERHUBUNGAN YANG LEBIH BAIK

TERWUJUDNYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

		35	kegiatan pemeliharaan rutin/berkala terminal pos, IPJ dan dermaga dalam kondisi baik	persentase terminal pos, IPJ dan dermaga dalam kondisi baik		1 unit	700,000							1 unit	700,000				
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA PELAYANAN APARATUR DINAS PERHUBUNGAN	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DINAS PERHUBUNGAN	1.00.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PERSENTASE KEHADIRAN PEGAWAI	0%	0%	0.00	0%	127,400,000.00	0%	0.00	0%	127,400,000.00	0%	0.00	0%	254,800,000.00	DISHUB	KAB. KAPUAS HULU
		02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Stel pakaian Dinas beserta kelengkapannya		-	0.00	98 Stel	88,200,000	-	-	98 Stel	88,200,000	0.00	196 Stel	176,400,000			
		04	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	jumlah stel Pakaian Batik Khas Daerah Kapuas Hulu dan Pakaian khusus		-	0.00	49 Stel	39,200,000	-	-	49 Stel	39,200,000	0.00	98 Stel	78,400,000			
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA PELAYANAN APARATUR DINAS PERHUBUNGAN	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DINAS PERHUBUNGAN	1.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE APARATUR YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN BIMTEK	0%	10%	195,500,000	20%	193,940,000	20%	193,940,000	20%	205,000,000	20%	205,000,000	90%	993,380,000	DISHUB	KAB. KAPUAS HULU
		1.09.1.09.01.05.01	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal/bintek	jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal/bintek		10 Org	195,500,000.00	12 Org	193,940,000	12 Org	193,940,000	15 Org	205,000,000	15 Org	205,000,000	79 Org	993,380,000		
MENINGKATKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN DINAS PERHUBUNGAN YANG LEBIH BAIK	TERWUJUDNYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN	1.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	persentase penyusunan pelaporan capaian kinerja tepat waktu	0%	0%	56,088,000	0%	47,489,850	0%	48,131,850	0%	48,131,850	0%	48,131,850	0%	242,115,400	DISHUB	KAB. KAPUAS HULU
		04	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1 bln	2,274,000	1 dokumen	4,431,850	dokume	4,431,850	dokume	4,431,850	dokume	4,431,850	4 dokumen	20,001,400		
		26	Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	jumlah dokumen Pengelolaan Aset		-	53,814,000.00	4 dokumen	37,200,000	dokume	37,200,000	dokume	37,200,000	dokume	37,200,000	16 dokumen	202,614,000		
		27	Kegiatan Penyusunan Renja DISHUB	jumlah dokumen Renja Dishub		-	0.00	-	-	dokume	6,500,000	dokume	6,500,000	dokume	6,500,000	3 dokumen	19,500,000		
		30	Kegiatan Penyusunan LAKIP	jumlah dokumen LAKIP Dishub		-	0.00	-	-	dokume	6,500,000	dokume	6,500,000	dokume	6,500,000	3 dokumen	19,500,000		
		42	laporan penyelenggaraan pemerintah	jumlah dokumen LPPD				1 dokumen	5,858,000	dokume	6,500,000	dokume	6,500,000	dokume	6,500,000	4 dokumen	25,358,000		
		1.09	PERHUBUNGAN																
		1.09.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	JUMLAH ARUS PENUMPANG ORANG DAN BARANG	Rp 151,754	0%	503,646,000	0%	838,297,650	0%	3,752,492,500	0%	532,992,500	0%	566,542,500	0%	6,193,971,150	DISHUB	KAB. KAPUAS HULU
		10	Kegiatan Pengawasan dan	tertib berlalu lintas di jalan		12 bln	220,516,000.00	12 bln	151,250,000.00	12 bln	151,250,000.00	12 bln	151,250,000.00	12 bln	151,250,000.00	4 Unit	825,516,000		

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERHUBUNGAN	MENINGKATNYA ARUS PERPINDAHAN BARANG DAN PENUMPANG	1.09.19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN JALAN	PERSENTASE JUMLAH FASILITAS JALAN	0%	0%	684,800,000	0%	880,000,000	0%	795,000,000	0%	785,000,000	0%	802,500,000	0%	3,517,300,000	DISHUB	KAB. KAPUAS HULU	
		02	Kegiatan Pengadaan Rambu rambu Lalu Lintas Sungai, Danau dan penyeberangan	jumlah Rambu-rambu Sungai, Danau dan penyeberangan		-	0.00	-	50 Buah	150,000,000	50 Buah	225,000,000	50 Buah	225,000,000	150 buah	600,000,000				
			Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana	terlaksananya tertip perparkiran dan lalu lintas di jalan					1 keg	85,000,000					1 keg	85,000,000				
			Kegiatan Pengadaan Identitas/nama -	Jumlah nama-nama Sungai dan Danau					100 buah	200,000,000	100 buah	200,000,000	100 buah	200,000,000	300 buah	600,000,000				
			Kegiatan Pengadaan papan nama jalan Kabupaten	Jumlah papan nama jalan Kabupaten Kapuas Hulu					15 Buah	30,000,000	15 Buah	30,000,000	20 Buah	40,000,000	50 Buah	100,000,000				
			Kegiatan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas jalan Kabupaten	Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas jalan Kabupaten Kapuas Hulu					20 buah	30,000,000	20 buah	30,000,000	25 buah	37,500,000	65 buah	97,500,000				
		08	Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum			1 Paket	584,800,000.00	4 lokasi	550,000,000.00	2 lokasi	300,000,000.00	2 lokasi	300,000,000.00	2 lokasi	300,000,000.00	10 lokasi	2,034,800,000		
			Kegiatan Sosialisasi tertip lalu lintas di jalan Raya	jumlah Sekolah Menengah Tingkat Atas di 23 Kecamatan					7 sekolah	120,000,000	8 sekolah	150,000,000	8 sekolah	150,000,000	23 Sekolah	420,000,000				
		5	kegiatan pengadaan rambu-rambu darat	jumlah Rambu-rambu lalin darat			1 lokasi	100,000,000.00	2 lokasi	330,000,000.00	1 lokasi	100,000,000.00	1 lokasi	100,000,000.00	1 lokasi	100,000,000.00	6 lokasi	730,000,000		
		1.09.20	PROGRAM PENINGKATAN KALITKAN	KIR KENDARAAN	0%	0%	28,760,000	0%	-	0%	28,760,000	0%	28,760,000	0%	28,760,000	0%	115,040,000			
		02	Kegiatan Pengadaan Alat-alat KIR Kendaraan Bermotor	jumlah Alat - alat Buku, Plat, Stiker KIR untuk pengujian kendaraan			1000 Set	28,760,000	0	-	1000 Set	28,760,000	1000 Set	28,760,000	4000 Set	115,040,000				
						8,766,050,000		8,310,250,000		7,926,974,590		3,752,894,590		3,668,424,590		22,036,779,370				

Putussibau, Februari 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Drs.H.ABDUL HALIM
PEMBINA TK.I
NIP. 19600410 198910 1 002

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan Sasaran Kinerja Program	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Unit Kinerja SKPD Penanggung	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	0	0%	1,494,864,600	0%	1,415,122,500	0%	1,800,650,240	0%	1,747,610,240	0%	1,739,490,240	0%	8,197,737,820	DISHUB	KAB. KAPUAS HULU
		1.02.09.01.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase Surat Menyurat		12 bln	11,500,000	12 bln	12,650,000	60 bln	62,100,000								
		02	Kegiatan	jumlah bulan		12 bln	30,000,000	12 bln	67,200,000	60 bln	298,800,000								
		06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasi		4 unit	9,500,000	5 unit	12,000,000	24 unit	57,500,000								
		07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Administrasi Keuangan		12 bln	70,080,000	15 org	86,100,000	20 org	102,600,000	20 org	102,600,000	20 org	102,600,000	60 bln	463,980,000		
		08	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan	jumlah satpam dan cleaning service		12 bln	12,765,200	4 org	88,157,000	16 org	365,393,200								
		09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	jumlah Peralatan kerja dalam kondisi baik		12 bln	33,500,000	38 unit	25,000,000	50 unit	32,894,740	50 unit	32,894,740	50 unit	32,894,740	188 unit	157,184,220		
		10	Kegiatan Penyediaan Alat	Alat Tulis Kantor		12 bln	43,672,000	12 bln	38,710,000	60 bln	198,512,000								
		11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Barang Cetak dan Pengandaan		12 bln	30,000,000	12 bln	32,852,000	60 bln	161,408,000								
		12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 bln	15,000,000	12 bln	7,129,000	60 bln	43,516,000								
		13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3 unit	20,930,000	0	-	6 set	48,000,000	5 unit	50,000,000	3 set	30,000,000	17 unit	148,930,000		
			Kegiatan pengadaan Peralatan mebeler Kantor	jumlah Peralatan mebeler Kantor						10 set	50,000,000	10 set	30,000,000	10 set	30,000,000	30 set	110,000,000		
		14	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah tangga	jumlah Peralatan dapur dan rumah tangga		-	0.00	0	0.00	6 unit	50,000,000	1 unit	11,000,000	1 unit	11,000,000	8 unit	72,000,000		
		15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4 penerbit	14,080,000	5 penerbit	16,560,000	3 penerbit	26,496,000	3 penerbit	26,496,000	3 penerbit	26,496,000	60 bln	110,128,000		

MENINGKATKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN DINAS PERHUBUNGAN YANG LEBIH BAIK

TERWUJUDNYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

		35	kegiatan pemeliharaan rutin/berkala terminal pos, IPJ dan dermaga dalam kondisi baik	persentase terminal pos, IPJ dan dermaga dalam kondisi baik		1 unit	700,000							1 unit	700,000				
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA PELAYANAN APARATUR DINAS PERHUBUNGAN	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DINAS PERHUBUNGAN	1.00.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PERSENTASE KEHADIRAN PEGAWAI	0%	0%	0.00	0%	127,400,000.00	0%	0.00	0%	127,400,000.00	0%	0.00	0%	254,800,000.00	DISHUB	KAB. KAPUAS HULU
		02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Stel pakaian Dinas beserta kelengkapannya		-	0.00	98 Stel	88,200,000	-	-	98 Stel	88,200,000	0.00	196 Stel	176,400,000			
		04	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	jumlah stel Pakaian Batik Khas Daerah Kapuas Hulu dan Pakaian khusus		-	0.00	49 Stel	39,200,000	-	-	49 Stel	39,200,000	0.00	98 Stel	78,400,000			
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA PELAYANAN APARATUR DINAS PERHUBUNGAN	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DINAS PERHUBUNGAN	1.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE APARATUR YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN BIMTEK	0%	10%	195,500,000	20%	193,940,000	20%	193,940,000	20%	205,000,000	20%	205,000,000	90%	993,380,000	DISHUB	KAB. KAPUAS HULU
		1.09.1.09.01.05.01	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal/bintek	jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal/bintek		10 Org	195,500,000.00	12 Org	193,940,000	12 Org	193,940,000	15 Org	205,000,000	15 Org	205,000,000	79 Org	993,380,000		
MENINGKATKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN DINAS PERHUBUNGAN YANG LEBIH BAIK	TERWUJUDNYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN	1.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	persentase penyusunan pelaporan capaian kinerja tepat waktu	0%	0%	56,088,000	0%	47,489,850	0%	48,131,850	0%	48,131,850	0%	48,131,850	0%	242,115,400	DISHUB	KAB. KAPUAS HULU
		04	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1 bln	2,274,000	1 dokumen	4,431,850	dokume	4,431,850	dokume	4,431,850	dokume	4,431,850	4 dokumen	20,001,400		
		26	Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	jumlah dokumen Pengelolaan Aset		-	53,814,000.00	4 dokumen	37,200,000	dokume	37,200,000	dokume	37,200,000	dokume	37,200,000	16 dokumen	202,614,000		
		27	Kegiatan Penyusunan Renja DISHUB	jumlah dokumen Renja Dishub		-	0.00	-	-	dokume	6,500,000	dokume	6,500,000	dokume	6,500,000	3 dokumen	19,500,000		
		30	Kegiatan Penyusunan LAKIP	jumlah dokumen LAKIP Dishub		-	0.00	-	-	dokume	6,500,000	dokume	6,500,000	dokume	6,500,000	3 dokumen	19,500,000		
		42	laporan penyelenggaraan pemerintah	jumlah dokumen LPPD				1 dokumen	5,858,000	dokume	6,500,000	dokume	6,500,000	dokume	6,500,000	4 dokumen	25,358,000		
		1.09	PERHUBUNGAN																
		1.09.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	JUMLAH ARUS PENUMPANG ORANG DAN BARANG	Rp 151,754	0%	503,646,000	0%	838,297,650	0%	3,752,492,500	0%	532,992,500	0%	566,542,500	0%	6,193,971,150	DISHUB	KAB. KAPUAS HULU
		10	Kegiatan Pemoayaan dan	tertib berlalu lintas di jalan		12 bln	220,516,000.00	12 bln	151,250,000.00	12 bln	151,250,000.00	12 bln	151,250,000.00	12 bln	151,250,000.00	4 Unit	825,516,000		

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERHUBUNGAN	MENINGKATNYA ARUS PERPINDAHAN BARANG DAN PENUMPANG	1.09.19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN JALAN	PERSENTASE JUMLAH FASILITAS JALAN	0%	0%	684,800,000	0%	880,000,000	0%	795,000,000	0%	785,000,000	0%	802,500,000	0%	3,517,300,000	DISHUB	KAB. KAPUAS HULU
		02	Kegiatan Pengadaan Rambu rambu Lalu Lintas Sungai, Danau dan penyeberangan	jumlah Rambu-rambu Sungai, Danau dan penyeberangan		-	0.00	-	50 Buah	150,000,000	50 Buah	225,000,000	50 Buah	225,000,000	150 buah	600,000,000			
			Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana	terlaksananya tertip perparkiran dan lalu lintas di jalan					1 keg	85,000,000					1 keg	85,000,000			
			Kegiatan Pengadaan Identitas/nama -	Jumlah nama-nama Sungai dan Danau					100 buah	200,000,000	100 buah	200,000,000	100 buah	200,000,000	300 buah	600,000,000			
			Kegiatan Pengadaan papan nama jalan Kabupaten	Jumlah papan nama jalan Kabupaten Kapuas Hulu					15 Buah	30,000,000	15 Buah	30,000,000	20 Buah	40,000,000	50 Buah	100,000,000			
			Kegiatan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas jalan Kabupaten	Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas jalan Kabupaten Kapuas Hulu					20 buah	30,000,000	20 buah	30,000,000	25 buah	37,500,000	65 buah	97,500,000			
		08	Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum		1 Paket	584,800,000.00	4 lokasi	550,000,000.00	2 lokasi	300,000,000.00	2 lokasi	300,000,000.00	2 lokasi	300,000,000.00	10 lokasi	2,034,800,000		
			Kegiatan Sosialisasi tertip lalu lintas di jalan Raya	jumlah Sekolah Menengah Tingkat Atas di 23 Kecamatan					7 sekolah	120,000,000	8 sekolah	150,000,000	8 sekolah	150,000,000	23 Sekolah	420,000,000			
		5	kegiatan pengadaan rambu-rambu darat	jumlah Rambu-rambu lalin darat		1 lokasi	100,000,000.00	2 lokasi	330,000,000.00	1 lokasi	100,000,000.00	1 lokasi	100,000,000.00	1 lokasi	100,000,000.00	6 lokasi	730,000,000		
		1.09.20	PROGRAM PENINGKATAN KALITKAN	KIR KENDARAAN	0%	0%	28,760,000	0%	-	0%	28,760,000	0%	28,760,000	0%	28,760,000	0%	115,040,000		
02	Kegiatan Pengadaan Alat-alat KIR Kendaraan Bermotor	jumlah Alat - alat Buku, Plat, Stiker KIR untuk pengujian kendaraan		1000 Set	28,760,000	0	-	1000 Set	28,760,000	1000 Set	28,760,000	1000 Set	28,760,000	4000 Set	115,040,000				
					8,766,050,000		8,310,250,000		7,926,974,590		3,752,894,590		3,668,424,590		22,036,779,370				

Putussibau, Februari 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Drs.H.ABDUL HALIM
PEMBINA TK.I
NIP. 19600410 198910 1 002

BAB 1

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2016 - 2021 dengan memperhitungkan potensi untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka di implentasi perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditujukan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi juga seluruh aparatur Kabupaten Kapuas Hulu dan Stakeholder lainnya yang ada di kabupaten kapuas Hulu.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan adanya kegagalan - kegagalan masa lalu dibidang pemerintah dan pembangunan dan adanya indikasi - indikasi, penyimpangan - penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, maka dalam era reformasi ini setiap aparatur pemerintah harus bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pemberi amanah serta harus memenuhi tuntutan dari masyarakat agar aparatur pemerintah yang baik (Good Governance) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melalui tiga pilar utama yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Disamping itu pelayanan prima menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh segenap jajaran pemerintah terutama di era keterbukaan sekarang ini, Pelayanan prima (service exelence) merupakan layanan oleh suatu unit organisasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat melebihi standar layanan publik / pelanggan. Pelayanan prima dimaksud harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik - baiknya sehingga dapat memenuhi sendi - sendi tata layanan umum seperti kesederhanaan kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Pelayanan prima seperti ini yang harus diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk itulah komitmen yang kuat sangat diharapkan dari seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu agar secara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan dan pekerjaan.

Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi tidak hanya unik dan berharga akan tetapi juga merupakan unsur penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Efektivitas operasional pengelolaan sumber daya yang ada dan langkah - langkah perbaikan diri perlu diambil untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layananan prima, seperti : semangat kompetisi, inovatif dan prasarana wilayah Kabupaten Kapuas Hulu perlu dibina dan dikembangkan serta diberdayakan terutama dalam kaitan

pemberian layanan prima dimaksud melalui penciptaan iklim organisasi yang terus menerus belajar (Learning Organization).

Salah satu instrument untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan layanan prima adanya perumusan rencana strategis yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disingkapi dengan arif dan bijak.

Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama - sama antara pemimpin dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Perumusan rencana Strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan - tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal / kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan - tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama selaras dengan visi dan misi organisasi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sejalan dengan reformasi disegala bidang telah membuahkan dasar - dasar perubahan dibidang Manajemen Pemerintahan, hal tersebut antara lain diwujudkan dalam :

1. Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang - undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan nasional;
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang - undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. TAP MPR RI No.XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
8. TAP MPR RI No.VX / MPR / 1998. tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan angka menengah daerah serta tata caraa perubahan serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu nomor 07 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaen Kapuas Hulu Tahun 2016;
14. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penunjukan Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021 yang memuat berbagai kebijakan dan program prioritas pembangunan Infrastruktur merupakan dokumen pembangunan untuk Tahun Anggaran 2016 - 2021.

Tujuan Renstra yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah diterapkan. Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 LATAR BELAKANG

1. 2 LANDASAN HUKUM

1. 3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. 4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERHUBUNGAN

2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS
PERHUBUNGAN

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

- 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
- 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
- 3.3 TELAAHAN RENSTRA K / L DAN RENSTRA
- 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
- 3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

“Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Bidang Perhubungan”.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Perhubungan melaksanakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Dinas Perhubungan;
2. Pelaksanaan urusan Pemerintah di Bidang Perhubungan;
3. Penyampaian evaluasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Susunan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a). Subbagian Program dan Keuangan
 - b). Subbagian Umum dan Aparatur
3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - a). Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

- b). Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana
- 4. Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
 - a). Seksi Manajemen Lalu Lintas
 - b). Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana
- 5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. 2. SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

2. 2. 1. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penentu keberhasilan yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasi.

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Sebanyak 30 Orang Pegawai dengan Komposisi 10 Orang Pejabat Struktural, 20 Orang Staf Pelaksana dan 19 Orang Tenaga Kontrak.

TABEL 2.1
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

No	Eselon/ Non Eselon	PANGKAT/GOLONGAN																	
		Gol. I				Gol. II				Gol. III				Gol. IV					Jml
		a	b	c	d	a	B	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3
3.	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	6
4.	Non Eselon	-	-	-	-	2	-	3	2	1	9	1	1	1	-	-	-	-	20
Jumlah		-	-	-	-	2	-	3	2	1	9	3	7	1	2	-	-	-	30

TABEL 2.1

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Eselon/ Non Eselon	PENDIDIKAN											
		SD	SMP	SMA	D 1	D 2	D 3	D 4	S 1	S 2	S 3	Jml	
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
3.	Eselon IV	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	6
4.	Non Eselon	-	-	16	-	-	1	-	-	3	-	-	20
Jumlah		-	-	20	-	-	1	-	-	8	1	-	30

2. 2. 2. SARANA DAN PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Gedung Kantor

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu menempati gedung Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Exs Kantor BPBD) yang terletak di jalan Nusa Indah No. 05 Putussibau Kabupaten kapuas Hulu, sesuai dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Penetapan Perubahan Status Penggunaan bangunan kantor Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia yaitu :

1. Patwal : 2 buah

2. Angkutan Pedesaan : 10 buah
3. Bis Sekolah : 2 buah
4. Kendaraan Roda Dua : 21 buah

Sarana Pendukung dan Perlengkapan kantor lainnya sampai tahun 2017

yaitu :

1. AC : 3 buah
2. Gambar Bupati Kapuas Hulu : 1 buah
3. Gambar Presiden RI : 1 buah
4. Gambar Wakil Bupati KH : 1 buah
5. Jam Dinding : 5 buah
6. Kaca Meja : 1 buah
7. Kipas Angin Dinding : 2 buah
8. Kompor Gas : 1 buah
9. Komputer / PC : 10 buah
10. Kursi Berputar : 3 buah
11. Kursi Besi Berbusa : 15 buah
12. Kursi Besi Lipat : 5 buah
13. Kursi Panjang : 3 buah
14. Putar Berbusa : 2 buah
15. Kursi Tamu Berbusa : 1 buah
16. Lemari Kayu Berkas : 5 buah
17. Lemari Rak Besi : 5 buah
18. Meja kerja : 30 buah
19. Meja Kerja 1 Biro : 1 buah
20. Meja Panjang : 1 buah
21. Note Book : 14 unit
22. Papan Kegiatan Kadis : 1 buah
23. Papan Kepegawaian : 1 buah
24. Papan Nama Struktur : 1 buah
25. Papan Pengumuman : 1 buah
26. Papan STOK : 1 buah
27. Papan Tulis Putih Kecil : 1 buah
28. Printer : 8 unit

- | | |
|-------------------------|----------|
| 29.Tabung Gas Kebakaran | : 1 buah |
| 30.Televisi | : 2 unit |

3. Sumber Dana

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu ditambah dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang jumlah belum pasti. Penganggaran Dana untuk kegiatan belanja publik maupun aparatur yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu telah mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sehingga Rencana Strategis ini dapat dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran (RKA).

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan pada bagian ini diukur berdasarkan indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan. Dituangkan kedalam bentuk tabel yang berisi pencapaian target, realisasi dan rasio pencapaian target tersebut. adapun tabelnya adalah sebagai berikut:

7	Terlaksananya peningkatan terminal	Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KONDISI BAIK		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-	-	1 unit	-	-	-	-	100%	-	-
8	Terlaksananya pembangunan pendopo	Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KONDISI BAIK		2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Terlaksananya rehabilitas dermaga apung	Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KONDISI BAIK		1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Terlaksananya rehabilitas/pemeliharaan lanting	Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KONDISI BAIK		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Terlaksananya rehab rumah jaga	Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KONDISI BAIK		1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	terpeliharanya rambu lalulintas darat	Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KONDISI BAIK		50 unit	-	50 unit	-	50 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Terlaksananya pemasangan rambu sungai dan danau	Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KONDISI BAIK		3paket	2paket	2paket	1paket	1paket	-	-	1paket	-	1paket	-	-	50%	-	100%

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.4.1. TANTANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi :

- a. Ruas jalan di Kabupaten Kapuas Hulu cukup panjang dan karakteristik jalan yang berdeda-beda;
- b. Tingkat kesadaran/kedisiplinan pengguna jalan di Kabupaten Kapuas hulu Masih rendah;
- c. Sarana dan prasarana rambu-rambu lalu lintas dan pengaman jalan yang masih minim
- d. Kuantitas sarana pemerintahan lainnya yang masih minim;
- e. Sumber daya manusia khususnya yang berlatar belakang pendidikan Transportasi baik Transportasi Darat maupun Transportasi Sungai belum tersedia.

2.4.2. PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi :

- a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;
- b. Kebutuhan dasar sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di Bidang Perhubungan;.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN

3. 1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang perhubungan belum ada;
2. Prasarana dan sarana penunjang kegiatan perkantoran masih sangat minim;
3. Masalah anggaran untuk kemajuan sarana dan prasarana perhubungan perlu untuk ditingkatkan untuk menunjang kunjungan wisata ke Kabupaten Kapuas Hulu.;

3.1.1. Permasalahan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sebagai berikut :

- a. Kondisi Rambu-rambu Jalan, sarana dan prasarana pendukung keselamatan lalu lintas masih perlu untuk ditingkatkan;
- b. Belum adanya tenaga yang berkompeten di bidang pengujian kendaraan bermotor (tenaga KIR) untuk menunjang pekerjaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. Belum tersediannya tenaga / pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang Perhubungan Darat.

3.1.2. Permasalahan Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, sebagai berikut :

- a. Kondisi Rambu-rambu Sungai dan Danau, sarana dan prasarana pendukung keselamatan lalu lintas Sungai dan Danau dan penyeberangan masih perlu untuk ditingkatkan;
- b. Belum tersedianya angkutan penumpang sungai dan danau Trayek Danau Sentarum ke Semitau untuk mendukung kunjungan wisata ke Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. Belum tersedianya fasilitas penyeberangan orang, barang dan kendaraan di Silat Hilir, Semitau dan Jongkong untuk kelancaran mobilisasi
- d. Belum tersediannya tenaga / pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang Perhubungan Sungai.
- e. Kondisi geografis sebagian besar di kecamatan merupakan daerah sungai sehingga masih perlu dibangun sarana dan prasarana transportasi sungai.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Penyusunan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA - SKPD) merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu sehingga semua langkah - langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan kabupaten Kapuas Hulu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021.

TELAAHAN VISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TERPILIH :

***“MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA
SAING DAN HARMONIS”.***

TELAAHAN MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TERPILIH :

- 1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;**
- 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan;**
- 3. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.**

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang termasuk kedalam urusan Dinas Perhubungan yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan meningkatkan layanan infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Urusan perhubungan dilaksanakan khususnya untuk menjamin terselenggaranya lalu lintas perhubungan baik manusia maupun barang. Lalu lintas sangat penting bagi pengembangan daerah. Oleh karena itu ketersediaan layanan perhubungan yang baik, aman dan murah menjadi syarat utama dalam mengembangkan daerah kabupaten kapuas hulu. Untuk itu diperlukan pelayanan transportasi yang baik. Maksudnya adalah bukan hanya sarana angkutan umum saja tetapi juga berupa sarana lalu lintas seperti rambu lalu lintas, marka, halte dan sebagainya sebagai pendukung keselamatan dan kenyamanan transportasi daerah. Untuk membuka aksesibilitas wilayah perlu diperimbangkan untuk melakukan evaluasi terhadap jalur angkutan umum khususnya untuk daerah yang menjadi sentra pengembangan daerah, baik sentra pertanian, pariwisata dan pendidikan. Adapun sasaran program yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan dalam rangka menunjang Misi Kepala Daerah yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan angkutan pada Dinas Perhubungan.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K / L DAN RENSTRA PROVINSI

Rencana Strategis (Renstra) disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian / Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K / L), yang merupakan dokumen perencanaan kementerian / lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian / lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

3.3.1. Visi dan Misi Kementerian Perhubungan RI

Visi :

- Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Misi :

- Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
- Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
- Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah;

Sasaran dan Tujuan :

- keselamatan dan keamanan,
- pelayanan transportasi, dan
- kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

PENDAHULUAN

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UU 24 / 1992), yang kemudian diperbaharui dengan Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26 / 2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang - undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Namun, setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan. Bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26 / 2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Definisi

Ada dua definisi KLHS yang lazim diterapkan, yaitu definisi yang menekankan pada pendekatan telaah dampak lingkungan (*EIA - driven*) dan pendekatan keberlanjutan (*sustainability - driven*). Pada definisi pertama, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Sedangkan definisi kedua, menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya.

Definisi KLHS untuk Indonesia kemudian dirumuskan sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip - prinsip keberlanjutan dalam, pengambilan keputusan yang bersifat strategis (*SEA is a systematic process for evaluating the environmental effect of, and for ensuring the integration of sustainability principles into, strategic decision - making*).

Peran KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara intern dalam kebijakan, rencana dan program (KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing - masing hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi - fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah

administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (kerap juga disebut “bio - region” dan atau “bio - geo - region”).

Sifat pengaruh KLHS dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu KLHS yang bersifat instrumental, transformatif, dan substantif. Tipologi ini membantu membedakan pengaruh yang diharapkan dari tiap jenis KLHS terhadap berbagai ragam RTRW, termasuk bentuk aplikasinya, baik dari sudut langkah - langkah prosedural maupun teknik dan metodologinya.

Pendekatan KLHS

Pendekatan KLHS dalam penataan ruang didasarkan pada kerangka bekerja dan metodologi berpikirnya. Berdasarkan literatur terkait, sampai saat ini ada 4 (empat) model pendekatan KLHS untuk penataan ruang, yaitu :

1. KLHS dengan Kerangka Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup / AMDAL (EIA - Mainframe)
KLHS dilaksanakan menyerupai AMDAL yaitu mendasarkan telaah pada efek dan dampak yang ditimbulkan RTRW terhadap lingkungan hidup. Perbedaannya adalah pada ruang lingkup dan tekanan analisis telaahannya pada tiap hirarhi KRP RTRW.
2. KLHS sebagai Kajian Penilaian Keberlanjutan Lingkungan Hidup (Environmental Appraisal)
KLHS ditempatkan sebagai *environmental appraisal* untuk memastikan KRP RTRW menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga bisa diterapkan sebagai sebuah telaah khusus yang berpijak dari sudut pandang aspek lingkungan hidup.
3. KLHS sebagai Kajian Terpadu / Penilaian Keberlanjutan (Integrated Assessment Sustainability Appraisal) KLHS diterapkan sebagai bagian dari uji KRP untuk menjamin keberlanjutan secara holistik, sehingga sudut pandangnya merupakan paduan kepentingan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dalam prakteknya, KLHS kemudian lebih ditempatkan sebagai bagian dari kajian yang lebih luas yang menilai atau menganalisis dampak sosial, ekonomi dan lingkungan hidup secara terpadu.
4. KLHS sebagai pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumber daya

Alam (Sustainable Natural Resource Management) atau Pengelolaan Berkelanjutan Sumber daya (Sustainable Resource Management) KLHS diaplikasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terlepas dari hirarki system perencanaan penggunaan lahan dan sumber daya alam, sebagai bagian dari strategi spesifik pengelolaan sumber daya alam.

Model a) menekankan pertimbangan - pertimbangan kondisi Sumber daya alam sebagai dasar dari substansi RTRW,

sementara model

b) menekankan penegasan fungsi RTRW sebagai acuan aturan pemanfaatan dan perlindungan cadangan sumberdaya alam.

Aplikasi - pendekatan di atas dapat diterapkan dalam bentuk kombinasi, sesuai dengan hirarki dan jenis RTRW yang akan dihasilkan / ditelaah, lingkup isu mengenai sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjadi fokus, konteks kerangka hukum RTRW yang dihasilkan / ditelaah, kapasitas institusi dan sumberdaya manusia aparatur pemerintah selaku pelaksana dan pengguna KLHS, serta tingkat kemauan politis atas manfaat KLHS terhadap RTRW.

Tabel 1. Contoh Pengaruh KLHS dalam RTRW

Tipe RTRW	Pengaruh KLHS	Tujuan KLHS dalam Penataan Ruang
RTRW berskala luas, memuat kebijakan dasar dan norma acuan bagi daerah (mis: RTRW Nasional atau Pulau)	Instrumental	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan • Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam substansi Rencana Tata Ruang Wilayah.

<p>RTRW yang memuat substansi khusus wilayah tertentu, harus memadukan kepentingan antar wilayah dan <i>stakeholder</i>, termasuk masyarakat (mis: RTRW Propinsi atau Kawasan tertentu setingkat Nasional atau Propinsi)</p>	<p>Transformatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki mutu dan proses formulasi substansi RTRW • Memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, dengan tujuan sosial dan ekonomi
<p>RTRW dengan cakupan luas terkecil, berisi arahan operasional / programatik, sangat diwarnai kekhasan situasi lokal dan aspirasi masyarakat setempat (mis: RTRW Kabupaten/Kota, Kawasan tertentu atau Rencana Detil Tata Ruang)</p>	<p>Substantif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan substansi RTRW (tingkat keberlanjutan substansi RTRW rendah • Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh (tingkat keberlanjutan substansi RTRW moderat) • Memelihara potensi sumberdaya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem (tingkat keberlanjutan substansi RTRW moderat sampai tinggi

Kerangka kerja KLHS

Prosedur penyelenggaraan KLHS untuk setiap pendekatan berbeda, namun secara generik hubungan antara komponen - komponen kerja KLHS dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penapisan

Kegiatan penapisan menentukan perlu atau tidaknya dilakukan KLHS terhadap sebuah konsep / muatan rencana tata ruang. Langkah ini diperlukan atas alasan - alasan :

- a) memfokuskan telaah pada KRP yang memiliki nilai strategik,
- b) memfokuskan telaah pada KRP yang diindikasikan akan memberikan konsekuensi penting pada kondisi lingkungan hidup, dan
- c) memberikan gambaran umum metodologi pendekatan yang akan digunakan.

Karena penyusunan RTRW wajib dilakukan maka tahap penapisan tidak diperlukan, sementara penyusunan RTR dengan tingkat kerincian Kawasan bisa ditapis terlebih dulu dengan menjawab pertanyaan - pertanyaan berikut :

- Apakah rancangan RTR berpotensi mendorong timbulnya percepatan kerusakan sumber daya alam (hutan, tanah, air atau pesisir) dan pencemaran lingkungan yang kini tengah berlangsung di suatu wilayah atau DAS? Dan atau
- Apakah rancangan RTR berpotensi meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, atau kekeringan di wilayah - wilayah yang saat ini tengah mengalami krisis ekologi? Dan atau
- Apakah rancangan RTR berpotensi menurunkan mutu air dan udara termasuk ketersediaan air bersih yang dibutuhkan oleh suatu wilayah yang berpenduduk padat? Dan atau
- Apakah rancangan RTR akan menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk golongan miskin sebagai akibat adanya pembatasan baru atas akses dan kontrol terhadap sumber - sumber alam yang semula dapat mereka akses? Dan atau
- Apakah rancangan RTR berpotensi mengancam keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) suatu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di masa mendatang? Jawaban positif bagi salah satu pertanyaan diatas sudah cukup untuk memberikan

alasan bahwa rancangan RTR tersebut memiliki potensi efek penting dan perlu dipertimbangkan untuk dilengkapi dengan KLHS

Pelingkupan

Pelingkupan merupakan proses yang sistematis dan terbuka untuk mengidentifikasi isu - isu penting atau konsekuensi lingkungan hidup yang akan timbul berkenaan dengan rencana KRP RTR Wilayah dan Kawasan. Berkat adanya pelingkupan ini, pokok bahasan dokumen KLHS akan lebih difokuskan pada isu - isu atau konsekuensi lingkungan dimaksud.

Telaah dan Analisis Teknis

Telaah dan analisis teknis adalah proses identifikasi, deskripsi, dan evaluasi mengenai konsekuensi dan efek lingkungan akibat diterapkannya RTRW; serta pengujian efektivitas RTRW dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Telaah dan analisis teknis mencakup :

- a) pemilihan dan penerapan metoda, serta teknik analisis yang sesuai dan terkini,
- b) penentuan dan penerapan aras rinci (*level of detail*) analisis agar sesuai dengan kebutuhan rekomendasi, dan
- c) sistematisasi proses pertimbangan seluruh informasi, kepentingan dan aspirasi yang dijarah. Jenis - jenis kerangka telaah yang lazim dibutuhkan, antara lain :
 - Telaah daya dukung dan daya tampung lingkungan,
 - Telaah hubungan timbal balik kegiatan manusia dan fungsi ekosistem.
 - Telaah kerentanan masyarakat dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana lingkungan.
 - Telaah ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pengembangan Alternatif

Alternatif yang dikembangkan dapat mencakup :

- a) substansi pokok / dasar RTRW (misalnya: pilihan struktur dan pola ruang),

- b) program atau kegiatan penerapan muatan RTRW (misalnya: pilihan intensitas pemanfaatan ruang), dan atau
- c) kegiatan - kegiatan operasional pengelolaan efek lingkungan hidup (misalnya : penerapan kode bangunan yang hemat energy).

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan untuk memilih alternatif terbaik yang bisa dilaksanakan yang dipercaya dapat mewujudkan tujuan penataan ruang dalam kurun waktu yang ditetapkan. Alternatif terpilih tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial akan tetapi juga dapat menjamin terpeliharanya fungsi lingkungan secara terus menerus. Berbagai metodologi yang lazim diterapkan dalam pengambilan keputusan, antara lain: *compatibility* (internal dan eksternal) *appraisal, benefit - cost ratio*, analisis skenario dan multikriteria, analisis risiko, survai opini untuk menentukan prioritas, dll.

Pemantauan dan Tindak Lanjut

Sesuai dengan kebutuhannya, kegiatan pemantauan dan tindak lanjut dapat diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pada dasarnya efektivitas penerapan rekomendasi KLHS berkaitan langsung dengan efektivitas RTRW bagi wilayah rencananya, sehingga tata laksanaanya bisa mengikuti aturan pemantauan efektivitas RTRW.

Partisipasi dan Konsultasi Masyarakat

Seluruh rangkaian KLHS bersifat partisipatif. Semua komponen kegiatan diwarnai berbagai bentuk partisipasi dan konsultasi masyarakat. Namun demikian, tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat sangat bervariasi tergantung pada aras (*level of detail*) RTRW, peraturan perundangan yang mengatur keterlibatan masyarakat, serta komitmen dan keterbukaan dari pimpinan organisasi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Secara umum boleh dikatakan bila KLHS diaplikasikan pada tingkat nasional atau provinsi, maka keterlibatan atau partisipasi masyarakat harus lebih luas dan intens dibanding KLHS pada tingkat kabupaten atau kota. Bila KLHS diaplikasikan untuk tingkat kabupaten, kota, atau kawasan, maka proses pelibatan

masyarakat atau konsultasi publik harus dilakukan sedini mungkin dan efektif. Hal ini disebabkan cakupan muatan RTRW yang bersifat operasional memiliki ragam penerapan yang variatif dan bersinggungan langsung dengan kegiatan masyarakat.

Secara spesifik, harus ada ketersediaan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk menelaah, memberikan masukan, dan mendapatkan tanggapan dalam proses KLHS. Kegiatan ini juga mensyaratkan adanya tata laksana penyaluran aspirasi masyarakat, termasuk pada tahap pengambilan keputusan.

Internalisasi KLHS dalam Proses Penyusunan RTRW

Komponen - komponen kerja KLHS dilaksanakan dengan memperhatikan proses formal yang berjalan. Kombinasi berbagai alternatif pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kekhususan proses pengambilan keputusan yang sedang terjadi pada masing - masing RTRW.

Dalam kasus dimana proses perencanaan RTRW belum terbentuk atau dilaksanakan, seluruh komponen kerja KLHS bisa dijadikan bagian yang tak terpisahkan dari langkah - langkah pekerjaan penyusunan RTRW. Pada situasi dimana KLHS hadir sebagai kebutuhan untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tahap akhir proses perencanaan, proses kerjanya bisa terpisah (*stand alone*). Banyak kondisi dimana kombinasi antara kedua hal diatas akan terjadi, misalnya pengintegrasian beberapa komponen kerja di tahap - tahap tertentu dan memisahkannya pada tahap yang lain. Dapat pula terjadi situasi dimana tidak semua komponen kerja perlu dilaksanakan atas alasan - alasan tertentu tanpa mengurangi nilai penting dari pelaksanaan KLHS itu sendiri.

Keterangan : Proses alternatif

Kerangka kerja diatas bisa dilakukan paralel atau semi terintegrasi terhadap proses revisi RTRW, misalnya dengan melakukan langkah - langkah (1) dan (2) pada tahap persiapan revisi RTRW, langkah (3) dan (4) pada tahap pengumpulan data dan analisis RTRW, dan langkah (5) dan (6) pada proses

konsepsi muatan RTRW hasil revisi. Namun bisa pula dilakukan proses KLHS terpisah saat draft dokumen hasil revisi RTRW sudah siap untuk ditelaah.

Keterangan : Proses alternatif

Kerangka kerja diatas dilakukan terintegrasi dengan proses penyusunan RTRW. Sebagai contoh, langkah (1) dilakukan pada tahap persiapan, langkah (2) dan (3) dilakukan selama proses analisis dan penyusunan konsep RTRW, dan langkah (4) masuk pada penjabaran program dan kegiatan dalam RTRW.

PENUTUP

Kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait dengan tata ruang wilayah sebagai produk dari rangkaian proses penataan ruang, yang diawali tahapan perencanaan tata ruang, oleh karena itu, perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah menjadi mutlak dan sangat strategis untuk segera direalisasikan guna menghambat laju penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan. KLHS bisa menjadi pilihan alat bantu untuk memperbaiki kualitas rencana tata ruang wilayah melalui perbaikan kerangka berfikir perencanaan tata ruang, yang berimplikasi pada perbaikan prosedur / proses dan metodologi / muatan perencanaan.

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil review terhadap faktor - faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan :

- 1) gambaran pelayanan Dinas Perhubungan;
- 2) sasaran jangka menengah DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2021 pada Renstra K / L;
- 3) Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Provinsi / kabupaten / kota dan;
- 4) implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD,

Maka ditentukan isu - isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas struktur, pola pemeliharaan dan tingkat pelayanan transportasi;
2. Peningkatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas darat dan rambu-rambu lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan;
3. Penentuan skala prioritas dan dukungan anggaran pembangunan dermaga penyeberangan untuk mempercepat pembangunan;
4. Perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pelayanan transportasi mulai dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN

4. 2. 1. TUJUAN (GOALS)

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor - faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasyarakat.

Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistie.

Adapun tujuan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

- 1. Memperkuat tata kelola pemerintahan Dinas Perhubungan yang lebih baik**
- 2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang mampu meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan**

4. 2. 2. SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam rangka waktu tahunan. Sasaran merupakan internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat capai orientasi pada hasil dan dapat dicapai pada periode tertentu. Sasaran Dinas Perhubungan selama 5 (lima) tahun periode 2016 - 2021 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran, indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan

dijadikan patokan / tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan beserta Indikator kinerja yang disajikan dalam bentuk Tabel sebagaimana berikut ini.

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu / evaluasi Nilai SAKIP Kabupaten Kapuas Hulu	CC	CC	B	B	BB
2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang mampu meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Meningkatkan Kelancaran dan Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan	35%	45%	50%	60%	70%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN

5.1. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk memfokus strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu faktor - faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*).

Faktor - Faktor kunci keberhasilan ini dapat diidentifikasi dari :

1. Kekuatan dan kelemahan,
2. Tantangan dan Kendala.

Yang dilengkapi dengan sumber daya, sarana prasarana, peraturan perundang - undangan dan kebijakan, serta dana.

Salah satu instrumen yang digunakan Pengukuran kinerja dalam menentukan faktor - faktor kunci keberhasilan ini adalah Analisa SWOT (*Stenght, Weaknes, Opporatunnities, Threacts*). Secara efektif analisa SWOT dapat membantu mengstrukturkan masalah dan menganalisa lingkungan internal dan eksternal. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimal kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportinnities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman(*Threats*).

Empat komponen yang selalu dimiliki oleh organisasi adalah kekuatan (*stengths*) dan kelemahan (*weakness*) secara eksternal. dengan analisa swot, dapat di inditifikasi setiap pontensi, peluang, kekuatan, kendala dan kelemahan suatu organisasi sehinga dapat ditentukan strategi yang dapat dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dari misi organisasi secara ektif efisien.

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

pelaksanaan proyek Berdasarkan hasil analisa, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai visi dan misi yang telah disepakati. faktor - faktor kekuatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, berpontesi menjadi kekuatan, karena struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Dinas tersebut disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat.
- 2) Suasana kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu cukup kondusif (kebersamaan diusahakan terjadinya suasana demokratis dengan melonggarkan ikatan struktural) yang kadang - kadang menghambat gerak organisasi jika diterapkan secara kaku. Ikatan tersebut dapat bermanfaat dalam mengembangkan kreatifitas individual maupun kelompok (team work). Suasana ini dipupuk terus terutama dalam kegiatan rapat - rapat pimpinan maupun diskusi - diskusi dalam tim - tim kerja penyusunan berbagai substansi yang merupakan kewajiban Dinas.
- 3) Memiliki akses terhadap perumusan kebijakan daerah, sehingga dapat membantu dalam pelaksanaan koordinasi dan dapat mewarnai kebijakan dengan konsep - konsep pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Memiliki akses terhadap pelaksanaan dan lembaga - lembaga terkait yang melakukan kegiatan / proyek fisik di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga memudahkan dalam penerapan paradigma dalam instansi Lainnya yang berada di daerah ini. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, sesuai dengan fungsinya senantiasa diminta bantuan teknis maupun personil oleh Dinas/Badan/Lembaga lainnya mengenai

segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan proyek - proyek pembangunan di instansi yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Kelemahan (Weakness)

Selain memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di atas Dinas Perhubungan Kabupaten kapuas Hulu masih memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, beberapa kelemahan tersebut sebagai berikut :

- 1) Sumber daya aparatur yang berkualifikasi teknis dan manajerial masih terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam kemampuan unit - unit Kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.
- 2) Sarana dan prasarana penunjang operasional kerja belum memadai seperti komputer, alat transportasi untuk meningkatkan kinerja petugas dilapangan Masih perlu penambahan jumlahnya.
- 3) Pembangunan yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas, karena bisa Menimbulkan keragu - ragan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

2. Lingkungan Ekternal

a. Peluang (Opportunities)

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai Visi dan Misinya diantaranya Sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan dan dukungan dari pimpinan daerah serta stakeholders yang Terkait dengan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan peluang yang sangat penting bagi pengembangan Dinas ini dimasa depan.
- 2) Kondisi keamanan didaerah yang relative stabil bila dibandingkan dengan Daerah lain, akan memberikan pengaruh bagi perkembangan pelaksana Kegiatan pembangunan.

- 3) Luasnya wilayah dan masih terbaginya transportasi pelaksanaan merupakan Peluang bagi pengembangan tugas - tugas Dinas.
- 4) Terbukanya bagi setiap pegawai untuk meningkatkan pengetahuannya Merupakan peluang yang penting terutama akan berpengaruh terhadap Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam melaksanakan Tugasnya.
- 5) Senantiasa terbuka kesempatan untuk mencari dana diluar APBD, Diantaranya
melalui usulan kepada pemerintahan pusat atau menggali partisipasi masyarakat
dalam memenuhi keterbatasan APBD merupakan peluang yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin.

b. *Ancaman (Threats)*

Selain peluang - peluang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat Pula ancaman terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pencapaian tujuan Yang telah ditetapkan. Ancaman ini terutama datang dari luar dinas yang akan Berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat Keberhasilannya. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah:

- 1) Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan di bidang Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu perlu ditingkatkan, karena tanpa adanya keikutsertaan masyarakat (stakeholders) dalam pembangunan, niscaya pelaksana tugas pokok Dinas Perhubungantidak akan mancapai sasaran.
- 2) Agenda Reformasi terus begulir dan salah satu dampaknya dalah tuntutan aspirasi masyarakat semakin kritis dan beragam yang mengarah pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakun berkurang. ini semua merupakan tantangan tersendiri bagi aparatur pemerintah, khususnya para pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, untuk senantiasa meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada produktivitas kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkannya akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor - faktor penentu keberhasilan (*Critical Succes Factor*).

Untuk dapat mengidentifikasi faktor - faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu di pengaruhi oleh faktor ekstern dan intern Organisasi, maka untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor - faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan perkembangan organisasi. Sebaiknya faktor - faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threat*) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Matriks analisa lingkungan ekstern (kekuatan dan kelemahan) dan Analisa Lingkungan ekstern (peluang dan ancaman) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2

Analisa Lingkungan (Peluang dan Ancaman)

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
1) Adanya SOTK Dinas Perhubungan Perbub Bupati KH No. 61 Tahun 2016	1) SDM yang berkualitas teknis Manajerial terbatas
2) Susunan Kerja Kondusif	2) Sarana dan Prasarana penunjang operasional belum memadai
3) Akses terhadap perumusan kebijakan	3) Keterbatasan dana dalam APBD

4) Akses terhadap pelaksana dan Lembaga	4) Belum lengkapnya ketentuan teknis Program / proyek
Peluang (O)	Hambatan (T)
1) Kepercayaan dan dukungan dari Pimpinan Daerah serta Stakeholders	1) Kesadaran masyarakat terhadap aturan tentang Dinas Perhubungan yang relatif kurang
2) Kondisi keamanan daerah yang relatif Stabil serta tuntutan pelayanan di Dinas Perhubungan	2) Tuntutan masyarakat yang kritis
3) Luasnya Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	3) Kondisi alam yang kurang mendukung
4). kesempatan bagi pegawai untuk Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan	4) Keterbatasan SDM di bidang Perhubungan

Dengan menggunakan Analisa SWOT, sejumlah faktor eksternal dan internal yang telah diidentifikasi, dipetakan dalam satu interaksi dan korelasi dengan menghubungkan antara kekuatan (strengths) dengan peluang (opportunity) atau strategi SO, kekuatan (strength) dengan ancaman (threats) atau strategi ST, kelemahan (weakness) dengan peluang (Opportunity) atau strategi WO, dan kelemahan (weakness) dengan ancaman (threats) atau strategi WT, strategi hasil pemetaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. STRATEGI SO (KEKUATAN DENGAN PELUANG)

- a) Adanya kewenangan yang secara legal berupa Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, untuk mengoptimalkan kepercayaan dan dukungan dari stakeholders berupa pelayanan dan pembangunan di bidang sarana dan prasarana dasar masyarakat.

- b) Suasana kerja yang kondusif seperti kerjasama yang baik, kesetiakawanan dan partisipatif merupakan dasar yang baik untuk menggarap secara optimal wilayah yang luas untuk dikembangkan.
- c) Adanya akses terhadap perumusan kebijakan daerah dapat digunakan untuk mengoptimalkan kesempatan bagi pegawai dalam mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya.
- d) Akses terhadap pelaksanaan dan lembaga - lembaga yang terkait yang melakukan kegiatan / proyek fisik semakin dipermudahakan oleh kondisi keamanan yang relatif stabil.

2. STRATEGI ST (KEKUATAN DENGAN ANCAMAN)

- a) Daya guna SOTK Dinas Perhubungan yang telah diformalkan Melalui keputusan Bupati No. 61 Tahun 2016, yang menjelaskan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan untuk mengatasi tuntutan masyarakat yang kritis atas kualitas pelayanan dan pekerjaan Dinas Perhubungan.
- b).Dayaguna akses terhadap perumusan kebijakan daerah untuk mengatasi Kesadaran masyarakat terhadap ketentuan di bidang ke Perhubungan relatif kurang.
- c).Dayaguna suasana kerja yang cukup kondusif dapat membantu mengatasi dengan segera akibat dari kondisi alam yang kurang mendukung.

3. STRATEGI WO (KELEMAHAN DENGAN PELUANG)

- a) Adanya akses kepercayaan dalam dukungan dari Pimpinan Daerah dalam perumusan kebijakan daerah dapat digunakan untuk meningkatkan kelengkapan ketentuan teknis program / proyek.
- b) Dengan luasnya wilayah dan masih kurangnya sarana transportasi, dapat digunakan untuk meningkatkan keterbatasan sarana dan prasarana menunjang operasional.
- c) Adanya kondisi keamanan daerah yang relatif stabil yang sejalan dengan permintaan pelayanan di bidang Perhubungan memberikan kesempatan terbuka

- d) Untuk mencari dana diluar APBD melalui Pemerintah Pusat dalam mengatasi keterbatasan dalam anggaran APBD untuk merealisasikan program pembangunan Perhubungan di Kabupaten Kapuas Hulu.
- e) Adanya kesempatan bagi para pegawai untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya guna meningkatkan kualitas SDM yang memiliki kualitas teknis dan managerial yang masih terbatas.

4. STRATEGI WT (KELEMAHAN DENGAN ANCAMAN)

- a) Antisipasi keterbatasan SDM yang berkualifikasi teknis dan managerial untuk mengatasi tuntutan masyarakat yang kritis atas pelayanan dan pekerjaan Dinas Perhubungan.
- b) Antisiapasi belum lengkapnya ketentuan teknis program / proyek untuk mengatasi kesadaran masyarakat yang relative kurang terhadap ketentuan pekerjaan Dinas Perhubungan.

Berdasarkan analisa SWOT dan pemetaan strategi tersebut diatas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu terus berusaha dan berhasil untuk merumuskan dan menganalisa Faktor - faktor keberhasilan (Critical Succes Factos) yang mencakup:

- 1 Adanya kewenangan yang legal berupa Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja untuk mengoptimalkan kepercayaan dan dukungan dari Stakeholders berupa Pelayanan dan pembangunan di bidang sarana dan prasarana dasar masyarakat.
- 2 Susunan kerja yang cukup kondusif seperti kerja sama yang baik kesetiakawanan dan partisipatif merupakan dasar yang baik untuk mangarap secara optimal wilayah yang luas dengan sarana dan prasarana Transportasi yang kurang.
- 3 Adanya akses terhadap perumusan kebijakan daerah dapat digunakan untuk mengoptimalkan kesempatan bagi pegawai dalam mengembangkan pengetahuan dan kemampuan.

- 4 Akses terhadap pelaksanaan dan lembaga - lembaga yang terkait yang melakukan kegiatan proyek fisik semakin dipermudah oleh kondisi keamanan daerah yang relative stabil.
- 5 Daya guna SOTK Dinas Perhubungan yang telah dipormalkan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu No. 61 Tahun 2016, yang menjelaskan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan untuk mengatasi tuntutan masyarakat yang kritis atas kualitas pelayanan dan pekerjaan Dinas Perhubungan.
- 6 Daya guna akses terhadap kebijakan daerah yang mengatasi kesadaran masyarakat terhadap ketentuan di bidang Perhubungan, prasarana wilayah yang relatif kurang.
- 7 Daya guna susunan kerja yang cukup kondusif untuk mengatasi dengan segera akibat dari kondisi yang kurang mendukung.
- 8 Daya guna akses terhadap pelaksana dan lembaga terkait yang melakukan proyek fisik untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkempanjang dengan menerapkan paradikma baru.
- 9 Adanya akses terhadap perumusan kebijakan daerah dapat digunakan untuk meningkatkan kelengkapan ketentuan teknis program / proyek.
- 10 Adanya akses terhadap perumusan kebijakan daerah dapat digunakan untuk meningkatkan keterbatasan sarana penunjang operasional.
- 11 Adanya kewenangan yang secara legal berupa keputusan bupati Kapuas Hulu Nomor : 61 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Untuk meningkatkan SDM yang berkualifikasi teknis dan Managerial. Adanya akses terhadap perubahan kebijakan daerah dapat digunakan untuk meningkatkan keterbatasan dana pembaganan sarana dan prasarana dasar di kabupaten Kapuas Hulu.

- 12 Antisipasi keterbatasan SDM yang berkualifikasi teknis dan managerial untuk mengatasi tuntutan masyarakat yang kritis terhadap pelayanan dan Dinas Perhubungan.
- 13 Antisipasi belum lengkapnya ketentuan teknis program / proyek untuk mengatasi kesadaran masyarakat yang relatif kurang terhadap ketentuan Dinas Perhubungan.
- 14 Antisipasi keterbatasan dana dalam APBD untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan diantaranya melalui usulan kepada pemerintah pusat (APBN) atau mengali partisipasi masyarakat.
- 15 Antisipasi ketidak stabilan harga dengan cara efisien diantaranya melalui usulan kepada pemerintah pusat (APBN) pemerintah Propinsi (APBD provinsi) atau mengali dari pihak lain yang berkompeten.
- 16 Antisipasi sarana dan prasarana penunjang operasional yang belum memadai untuk mengatasi kondisi alam yang kurang mendukung.

5.2. KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam usaha mencapai sasaran, tujuan, misi, visi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. Kebijakan dapat berupa regulative seperti aturan, sistem dan prosedur maupun alokatif seperti sumber daya yang terdiri dari dana, personil, sarana dan prasarana serta waktu.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat berfungsi :

1. Memberikan petunjuk prinsip - prinsip, rambu - rambu dan signal - signal penting dalam menyusun program dan kegiatan.
2. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan.
3. Memberikan keyakinan bagi pelaksana (baik Aparatur Pemerintah maupun Masyarakat).

4. Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Adapun strategi Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan Review Kinerja Organisasi secara berkala**
- 2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendukung Infrastruktur Transportasi**

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Menuju Kapuas Hulu yang lebih sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis			
MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih			
MISI 2 : Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perhubungan yang lebih baik	1. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	1. Melaksanakan Reviu Kinerja Organisasi Secara Berkala	Peningkatan Kualitas Tatalaksana dan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1. Meningkatnya Kelancaran dan Pelayanan Transportasi	1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendukung Infrastruktur Transportasi	1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
			2. Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pelayanan dibidang Perhubungan

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perhubungan Yang Lebih Baik	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu	CC	C	B	B	BB
2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasaran Perhubungan yang Mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Meningkatnya Kelancaran dan Pelayanan Perhubungan	indeks kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan	35%	45%	50%	60%	70%

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan.

Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.

Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan - permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang direncanakan untuk Periode Tahun 2017 - 2021 meliputi :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Kelengkapan Kantor
- d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
- e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- f. Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor
- g. Penyediaan perbaikan peralatan kerja
- h. Penyediaan alat tulis kantor
- i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- j. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- k. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor

- l. Kegiatan pengadaan Peralatan Mebeleur Kantor
- m. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga
- n. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
- o. Penyediaan makanan dan minuman
- p. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- q. Rapat - rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah
- r. Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa
- s. Penyusunan RKA dan DPA
- t. Penyediaan jasa pendukung kantor
- u. Penyediaan jasa publikasi.

Indikator kinerja :

Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Roda Dua
- b. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Roda Empat
- c. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /Patroli Roda Empat
- d. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
- e. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- f. kegiatan pemeliharaan rutin/berkala terminal pos, IPJ dan dermaga

Indikator kinerja :

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- a. Pendidikan dan pelatihan formal/ Bimbingan Teknis

Indikator kinerja :

Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan/bimtek

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan :

- a. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- b. Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD
- c. Kegiatan Penyusunan Renja DISHUB
- d. Kegiatan Penyusunan LAKIP
- e. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Indikator kinerja :

Persentase penyusunan pelaporan capaian kinerja tepat waktu.

5) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- b. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Indikator kinerja :

Persentase kehadiran Pegawai

6) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan :

- a. Kegiatan Pengawasan dan Patroli Lalu Lintas jalan
- b. Monitoring Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau
- c. Kegiatan Fasilitas Perizinan di Bidang ASDP
- d. Manajemen Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau
- e. kegiatan kelayakan sarana dan prasarana guna keselamatan penumpang
- f. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Angkutan jalan
- g. Koordinasi dalam Pelayanan Angkutan Tingkat Propinsi
- h. Pemeliharaan Fasilitas Umum Lalu Lintas ASDP
- i. Kegiatan pengadaan Speed Boat untuk sarana ASDP
- j. Kegiatan Pengadaan Ponton dan Kapal Dorong
- k. Pelayanan KIR Keliling
- l. Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan dan lokasi Parkir

Indikator kinerja :

- a. Jumlah arus Penumpang orang dan barang

7). Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Kegiatan :

- a. Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi dan Gedung Terminal (Pekerjaan Pembangunan Halte Sungai, Tambatan Perahu, Steigher dan Dermaga Mini)
- b. Pembangunan Tambatan Perahu/lanting dan Dermaga
- c. Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi dan Gedung Terminal (Pekerjaan Pembangunan Halte Darat dan Terminal Pedesaan)
- d. Pengadaan Mobil Angkutan Pedesaan (ANGKUEDES)
- e. Perencanaan Untuk DED Pembangunan Dermaga Penyeberangan

Indikator kinerja :

- a. Persentase jumlah dermaga, halte, steigher dan tambatan perahu

8). Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan :

- a. Kegiatan Pengadaan Rambu rambu Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
- b. Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana penunjang kegiatan penertipan perparkiran dan lalu lintas jalan
- c. Kegiatan Pengadaan Identitas/nama -nama Sungai dan Danau
- d. Kegiatan Pengadaan papan nama jalan Kabupaten
- e. Kegiatan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas jalan Kabupaten
- f. Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
- g. Kegiatan Sosialisasi tertip lalu lintas di jalan Raya
- h. kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas darat

Indikator kinerja :

- a. Persentase jumlah fasilitas jalan

9). Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Kegiatan :

- f. Kegiatan Pengadaan Alat-alat KIR Kendaraan Bermotor

Indikator kinerja :

- a. KIR Kendaraan

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,561,066,100	1,301,075,220	1,734,288,100	1,652,578,496	1,821,888,456	1,536,384,622	1,263,366,205	1,695,227,982	1,633,434,992	1,801,347,992	98.42%	97.10%	97.75%	98.84%	98.87%	8,070,896,372	7,929,761,793
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	561,830,000	424,980,000	1,704,998,000	411,500,000	216,000,000	561,362,205	422,409,200	1,700,585,000	411,494,000	216,000,000	99.92%	99.40%	99.74%	100.00%	100.00%	3,319,308,000	3,311,850,405
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	49,500,000	17,000,000	35,400,000	74,800,000		49,300,000	16,984,000	35,310,000	74,767,000		99.60%	99.91%	99.75%	99.96%		176,700,000	176,361,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	113,675,000	246,160,000	309,648,400	359,143,000	249,893,144	113,647,000	245,272,200	306,722,514	354,635,800	249,893,144	99.98%	99.64%	99.06%	98.75%	100.00%	1,278,519,544	1,270,170,658
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	36,000,000	61,355,000	109,848,000	55,954,500	113,559,000	35,996,000	61,355,000	109,648,000	54,854,500	113,552,000	99.99%	100.00%	99.82%	98.03%	99.99%	376,716,500	375,405,500
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	1,126,328,000	1,062,101,000	2,044,361,000	1,239,339,204	734,821,000	1,120,681,000	1,045,461,500	2,016,798,076	1,205,226,652	734,698,100	99.50%	98.43%	98.65%	97.25%	99.98%	6,206,950,204	6,122,865,328
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	840,000,000	2,744,990,000	2,743,500,000	2,056,641,500	1,796,590,000	836,927,000	2,002,344,255	2,724,808,499	2,046,832,500	1,759,958,900	99.63%	72.95%	99.32%	99.52%	97.96%	10,181,721,500	9,370,871,154

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	839,000,000		200,000,000		706,550,000	746,738,000		20,568,000		613,278,500	89.00%		10.28%		86.80%	1,745,550,000	1,380,584,500
PROGRAM PENINGKATAN KALAIKAN PENGOPERASTAN KENDARAAN BERMOTOR	109,040,000	38,560,000	1,655,000,000	25,000,000	25,000,000	108,923,100	38,530,000	1,649,999,000	24,970,000	24,970,000	99.89%	99.92%	99.70%	99.88%	99.88%	1,852,600,000	1,847,392,100
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN			-	-	-											-	-
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	370,067,800	902,514,500	150,693,500		26,185,000	363,622,700	871,610,620	147,352,900		26,137,000	98.26%	96.58%	97.78%		99.82%	1,449,460,800	1,408,723,220
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI MEDIA MASSA	350,000,000	250,000,000	1,082,937,000			349,404,000	249,773,200	1,046,915,200			99.83%	99.91%	96.67%			1,682,937,000	1,646,092,400
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA			298,940,000					298,233,300					99.76%			298,940,000	298,233,300
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA			248,690,000	1,704,648,540	1,387,197,400			248,405,200	1,675,465,876	1,380,197,138			99.89%	98.29%	99.50%	3,340,535,940	3,304,068,214
PRGRAM DESA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI			51,625,000					51,176,700					99.13%			51,625,000	51,176,700
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI				550,000,000	712,109,000				523,327,844	695,627,793				95.15%	97.69%	1,262,109,000	1,218,955,637
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA					14,046,000					14,037,000					99.94%	14,046,000	14,037,000
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI					24,000,000					23,999,800					100.00%	24,000,000	23,999,800
	5,956,506,900	7,048,735,720	12,369,929,000	8,129,605,240	7,827,839,000	5,822,985,627	6,217,106,180	12,051,750,371	8,005,009,164	7,653,697,367	97.76%	88.20%	97.43%	98.47%	97.78%	41,332,615,860	39,750,548,709

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
Nilai SAKIP Dinas Perhubungan / Evaluasi Nilai SAKIP
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan

**INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
YANG MENGACU KEPADA RPJMD**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Sakip	CC	CC	C	B	B	BB	BB
2	indek kepuasan masyarakat	25%	35%	45%	50%	60%	70%	70%
3	Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	45%	55%	65%	75%	85%	95%	95%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan administrasi pemerintah yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang profesional, efisien, efektif serta tanggungjawab terhadap aspirasi masyarakat dan pihak – pihak yang dilayani. Penyusunan Rencana Strategis sebagai bahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dalam pengambilan keputusan.

Penyusunan dokumen Perencanaan Stratejik (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017- 2021 disusun dengan mengacu kepada Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, dengan menghimpun berbagai program dan kegiatan yang menjadi wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.